

## PENGARUH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA UMKM DI KOTA KEDIRI

Wiwiek Andajani<sup>1</sup>, I Gusti Gede Heru Marwanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia

e-mail: [wiwiekand@unik-kediri.ac.id](mailto:wiwiekand@unik-kediri.ac.id)<sup>1</sup>, [hmarwanto@unik-kediri.ac.id](mailto:hmarwanto@unik-kediri.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*The Government of Kediri City received an award regarding regional government management in 2020 with a very high score of 3.4198. This award was given by the Ministry of Home Affairs. The award is expected to have a significant influence on increasing economic growth and community welfare in the Kediri city area. From BPS data, the economic growth and public welfare (Human Development Index/HDI) of the city of Kediri increased in 2018 – 2019. Nevertheless, in 2020 there was a decline in economic growth regardless of an increase in the HDI. The achievement proved a high commitment from the government of Kediri City in efforts to increase economic growth and community welfare through the allocative role of regional expenditures. The purpose of the research was to determine the effect of increasing local government spending on the performance of the Kediri City Government and to determine the performance factors of MSMEs that have a dominant influence in their contribution to increasing the rate of economic growth in Kediri City. Using quantitative research methods and the survey, the sample was determined intentionally, namely MSMEs that receive financial assistance/grants from the local government. The results of the analysis show that there was an effect of increasing regional spending on the performance of MSMEs. The main performances of MSMEs included increased sales growth, capital, annual additional workforce, market share, and marketing growth, as well as better operating profits.*

**Keywords:** regional expenditure; performance; MSMEs; management

### Abstrak

Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dengan skor yang sangat tinggi, yaitu 3,4198. Penghargaan ini tentunya diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari data BPS, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (IPM) kota Kediri mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2019. Akan tetapi, di tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, meskipun IPM meningkat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah Kota Kediri dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peran alokatif belanja daerahnya. Terkait hal ini, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan belanja daerah Pemerintah Kota Kediri terhadap kinerja UMKM dan untuk mengetahui faktor kinerja UMKM yang memberikan pengaruh dominan dalam kontribusinya pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Metode penelitian kuantitatif ini dilaksanakan melalui survey. Penentuan sampel dilakukan secara sengaja, yaitu umkm yang memperoleh bantuan dana/hibah dari pemerintah daerah. Hasil analisisnya menunjukkan adanya pengaruh peningkatan belanja daerah Pemerintah Kota Kediri terhadap kinerja UMKM. Adapun yang termasuk dalam kinerja utama UMKM, di antaranya adalah meningkatnya pertumbuhan penjualan, modal, penambahan tenaga kerja setiap tahun, pertumbuhan pangsa pasar dan pemasaran, serta keuntungan laba usaha yang semakin baik.

**Kata kunci:** belanja daerah; kinerja; UMKM; pengelolaan

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2020 menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerjanya dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah dengan skor yang sangat tinggi, yaitu 3,4198. Kinerja pemerintah yang sangat tinggi ini, tentunya diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan pada setiap pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yang ada di lingkungan Kota Kediri. Hal ini akan terlihat dalam hal kebijakan penyusunan belanja daerah yang merupakan sektor paling penting. Alokasi belanja daerah Kota Kediri pada umumnya mengarah pada kepentingan masyarakat, salah

satunya adalah peningkatan dan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan penyusunan belanja tersebut tentunya dengan pertimbangan yang matang dan tepat sasaran berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi dalam komposisi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial/keuangan, belanja modal, dan belanja barang dan jasa pada pos belanja daerah. Hal ini terlihat dari struktur belanja daerah pada APBD Kota Kediri tahun 2018 – 2020 yang ditampilkan dalam bentuk Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Komposisi Struktur Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri  
 Tahun 2018 – 2020 (dalam jutaan Rp)

| No Uraian Belanja                | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Belanja Tidak Langsung</b> | <b>611.349,738</b>   | <b>652.452,750</b>   | <b>637.252,996</b>   |
| 1. Belanja Pegawai               | 481.417,447          | 537.066,430          | 571.309,753          |
| 2. Belanja Hibah                 | 57.664,897           | 54.632,341           | 38.056,701           |
| 3. Belanja Bantuan Sosial        | 70.540,333           | 59.026,981           | 26.884,542           |
| 4. Belanja Bantuan Keuangan      | 727,061              | 727.061              | -                    |
| 5. Belanja Tidak Terduga         | 1.000,000            | 1.000,000            | 1.000,000            |
| <b>II. Belanja Langsung</b>      | <b>745.994,985</b>   | <b>894.581,424</b>   | <b>787.372,924</b>   |
| 1. Belanja Pegawai               | 133.441,028          | 145.248,271          | 137.324,745          |
| 2. Belanja Barang dan Jasa       | 439.310,048          | 513.048,438          | 525.018,940          |
| 3. Belanja Modal                 | 173.243,909          | 236.284,715          | 125.029,239          |
| <b>Jumlah Belanja</b>            | <b>1.357.344,723</b> | <b>1.547.034,174</b> | <b>1.424.625,920</b> |

Sumber: data APBD Kota Kediri diolah, 2021

Peningkatan belanja daerah terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019. Sayangnya, di tahun 2020 terdapat penurunan pendapatan karena disesuaikan dengan penurunan pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19. Walaupun demikian, jika dilihat dari data BPS (2020), mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (IPM) di kota Kediri tetap terlihat peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,43% naik menjadi 5,47%; sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi -6,25%, yang tidak terlepas dari merebaknya wabah pandemi Covid-19 di Kota Kediri.

Wali Kota Kediri menyampaikan kepada DPRD Kota Kediri Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa terdapat perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi dalam rentang waktu Tahun 2018 sampai 2020. Rincian perkembangannya adalah 2018-2019 sebesar 51,52 naik menjadi 59,65 yang kenaikannya mencapai 8,13% dan di rentang 2019-2020 meningkat menjadi 65,50 dengan kenaikan 5,85. Selanjutnya, Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Tahun 2018-2020 naik 0,23 dari 3,23 menjadi 3,48 di tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2018-2020 juga mengalami kenaikan dari 0,65 dari yang awalnya 77,58 menjadi 78,23 yang masuk dalam kategori tinggi sesuai standar dari *United Nations Development Programme* (UNDP).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Kota Kediri, kecuali di tahun 2020 akibat pengaruh pandemi Covid-19, jelas memberikan hasil atas komitmen pemerintah Kota Kediri dalam upaya peningkatan kesejahteraan warganya. Hal ini bermakna bahwa dari segi ekonomi, alokasi belanja daerah dianggap dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektifitas tersebut merupakan hasil dari kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomis pada sektor ekonomi dalam komposisi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja keuangan, belanja modal, serta belanja barang dan jasa pada pos belanja daerah.

Di lain sisi, peranan sektor usaha industri pengolahan dalam perekonomian di Kota Kediri cukup signifikan. Kontribusi sektor industri pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri mencapai 80 persen setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri (2019), terdapat 451 perusahaan di Kota Kediri. Selama tahun 2017, perusahaan di Kota Kediri yang bergerak di bidang industri makanan jumlahnya sebanyak 191 perusahaan. Jumlah ini bertambah menjadi 233 perusahaan pada tahun 2019. Peningkatan jumlah industri di bidang penyediaan, akomodasi, dan makanan minuman ternyata memberikan kontribusi yang meningkat pada laju pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri berdasarkan kategori, yaitu dari 4,78 (2018) menjadi 7,24 (2019) yang merupakan peningkatan tertinggi pada laju pertumbuhan ekonomi di kota Kediri.

Berdasarkan paparan di atas, diduga terjadi peningkatan kinerja UMKM atas adanya upaya pemerintah daerah Kota Kediri melalui peningkatan alokasi belanja daerah dalam mengembangkan UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa bentuk penyaluran APBD memang ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maflukhah, 2015; Deswanto *et al.*, 2017; Rohmah, 2018; Islami *et al.*, 2021). Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk melihat hubungan antara belanja daerah Kota Kediri khususnya tahun 2018 dan 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19 dan pada tahun 2020, setelah terjadi pandemi Covid-19, terhadap kinerja UMKM. Lebih dari itu, penelitian menganalisis faktor kinerja UMKM yang memberikan pengaruh dominan dalam kontribusinya pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di kota Kediri. Berdasarkan penelitian Hamdani dan Iwatara (2015), diduga bahwa aspek SDM, keuangan, produksi dan operasional, pasar dan pemasaran, modal psikologi wirausaha dan inovasi berkontribusi terhadap kinerja UMKM.

## METODE

Penelitian dan hipotesis yang diajukan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian langsung (*field research*) pada pelaku UMKM yang dipandang memiliki kinerja baik. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Kediri, dengan pertimbangan Pemerintah Kota Kediri baru saja memperoleh penghargaan atas kinerja pemerintahannya seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah UMKM di Kota Kediri dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun tersebut. Jumlah UMKM di Kota Kediri berdasarkan data yang diperoleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri pada tahun 2021 sebesar 5.808 yang meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 5.070 UMKM.

Populasi yang dijadikan sumber penelitian adalah dari UMKM di Kota Kediri yang memperoleh bantuan langsung atau tidak langsung dari Pemerintah Kota Kediri dengan teknik pengambilan sampel terhadap UMKM dilakukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih memperoleh bantuan dana/hibah dari pemerintah Kota Kediri dan dapat memberikan jawaban atau informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. UMKM di Kota Kediri yang dijadikan sebagai sampel adalah Kelompok UMKM yang dipandang memiliki kinerja baik oleh Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri atau rekomendasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kediri, yaitu sebanyak 16 UMKM.

Data dalam penelitian akan dikumpulkan dengan beberapa teknik yakni teknik observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan di analisis menggunakan teknik regresi linier berganda menggunakan SPSS. variabel *independent* akan terlihat pengaruhnya dengan variabel *dependent* saat diuji dengan uji determinasi (*R-square*) dan uji F. Jika hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh variabel bebasnya (*dependent*) maka akan dilakukan uji t untuk mengetahui faktor-faktor manakah yang paling dipengaruhi dan signifikan terhadap kinerja UMKM maupun pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.

Rumus Analisis Regresi Berganda :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n.$$

Y adalah variabel tergantung (*dependent*), dan X adalah variabel-variabel bebas

(independent), a adalah konstanta (*intercept*) dan b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R). sedangkan uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tergantungnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri sejumlah 45.629 berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016 dan hasil survey pertanian antar sensus (SUTAS) 2018 yang didominasi oleh UMKM sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15.332 UMKM (33,60%) dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 11.697 UMKM (25,63%). Berikut adalah tabel UMKM menurut Lapangan Usaha di Kota Kediri dan Jawa Timur Tahun 2019.

**Tabel 2.** Jumlah UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha di Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

| No    | Sektor/Lapangan Usaha                                         | Kota Kediri | Jawa Timur | %    |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|
| 1     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 6.490       | 5.163.979  | 0,13 |
| 2     | Pertambangan dan Penggalian                                   | 22          | 27.169     | 0,08 |
| 3     | Industri Pengolahan                                           | 3.646       | 853.974    | 0,43 |
| 4     | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 46          | 4.443      | 1,03 |
| 5     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 241         | 17.214     | 1,40 |
| 6     | Konstruksi                                                    | 440         | 41.748     | 1,05 |
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15.332      | 2.068.040  | 0,74 |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                  | 1.156       | 164.037    | 0,70 |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 11.697      | 819.483    | 1,43 |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                      | 801         | 112.052    | 0,71 |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 318         | 19.441     | 1,64 |
| 12    | Real Estate                                                   | 403         | 18.838     | 2,14 |
| 13    | Jasa Perusahaan                                               | 592         | 66.426     | 0,89 |
| 14    | Jasa Pendidikan                                               | 1.148       | 112.411    | 1,02 |
| 15    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            | 349         | 36.148     | 0,95 |
| 16    | Jasa lainnya                                                  | 2.948       | 256.859    | 1,15 |
| Total |                                                               | 45.629      | 9.782.262  | 0,47 |

Sumber : Kantor UMKM Provinsi Jawa Timur, 2019

Jumlah UMKM di Kota Kediri dibandingkan dengan jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur hanya 0,47%. Sedangkan bila dikelompokkan rekap jumlahnya UMKM berdasarkan kategori sektor usaha pertanian dan non pertanian, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.** Jumlah UMKM Menurut Sektor Usaha Pertanian dan Non Pertanian di Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

| No | Sektor/Lapangan Usaha                  | Kota Kediri | Jawa Timur | %    |
|----|----------------------------------------|-------------|------------|------|
| 1  | <b>Sektor Lapangan Usaha Pertanian</b> |             |            |      |
|    | a. Mikro                               | 6.409       | 5.094.920  | 0,13 |
|    | b. Kecil                               | 55          | 48.684     | 0,11 |
|    | c. Menengah                            | 26          | 20.375     | 0,13 |
|    | d. Total                               | 6.490       | 5.163.979  | 0,13 |

|   |                                            |        |           |      |
|---|--------------------------------------------|--------|-----------|------|
| 2 | <b>Sektor Lapangan Usaha Non Pertanian</b> |        |           |      |
|   | a. Mikro                                   | 33.574 | 4.038.939 | 0,83 |
|   | b. Kecil                                   | 4.773  | 530.883   | 0,90 |
|   | c. Menengah                                | 792    | 48.461    | 1,63 |
|   | d. Total                                   | 39.139 | 4.618.283 | 0,85 |
|   | Total                                      | 45.629 | 9.782.262 | 0,47 |

Sumber : Kantor UMKM Provinsi Jawa Timur, 2019

Berdasarkan rekapitulasi jumlah UMKM berdasarkan sektor lapangan usaha pertanian dan sektor lapangan usaha non pertanian, menunjukkan sektor lapangan usaha pertanian di Jawa Timur berjumlah 5.163.979 unit (52,79%) sedangkan yang sektor lapangan usaha non pertanian sebesar 4.618.283 unit (47,21%). Untuk Kota Kediri jumlah UMKM berdasarkan sektor lapangan usaha pertanian total sebanyak 6.490 unit, 0,13% dari sektor lapangan usaha pertanian di Jawa Timur. Sedangkan jumlah UMKM sektor lapangan usaha non pertanian berjumlah 39.139 unit atau 0,85% dari jumlah UMKM sektor lapangan usaha non pertanian Jawa Timur.

#### a. Anggaran Belanja Daerah

UMKM yang jelas memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, tentunya akan menjadi prioritas atau komitmen dari pemerintah untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan UMKM ini melalui beberapa program kerja pemerintah tersebut. Hal ini tentunya memerlukan ketersediaan anggaran belanja yang cukup besar yang sinkron dengan jumlah dan porsi UMK itu sendiri.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan rangkaian program dan kegiatan pemerintah dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu belanja langsung adalah perbelanjaan yang terkait dengan seluruh kegiatan dan program. Belanja langsung yang dimaksud adalah memberikan pendanaan pada setiap satuan kerja masing-masing menjalankan program dan kegiatan dalam urusan pemerintah (Lestari *et al.*, 2018). Kategori pendanaan dalam belanja langsung adalah: Honor Pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan belanja tak langsung adalah pendanaan yang tidak ada hubungan langsung dengan program dan kegiatan. Yang masuk dalam kategori tidak langsung adalah gaji pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan tak terduga (Chamdani, 2018).

Adanya belanja daerah akan memajukan daerah dan berperan dalam kegiatan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, semakin banyak pendanaan akan semakin banyak juga manfaatnya asalkan dimanfaatkan bagi kepentingan yang benar untuk memajukan daerahnya. Kemandirian dari tiap daerah nantinya memerlukan partisipasi atau sumbangsih secara sukarela untuk menambah pendapatan asli daerah dengan membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp22.600.784.565.952,43 dimana Rp13.077.001.912.992,43 (57,86%) merupakan belanja tidak langsung dalam bentuk belanja untuk subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp35.196.609.483.734,00 dengan belanja tidak langsungnya yang sebesar Rp14.480.400.460.627,00 (41,14%) digunakan belanja untuk subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Walaupun dari nilai belanja untuk subsidi, hibah atau bantuan tersebut nilainya meningkat, namun jika dibandingkan ada penurunan prosesntase belanja daerah untuk belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Namun tetap diharapkan melalui anggaran belanja ini dapat mendorong sektor UMKM lebih produktif, inovatif dan berdaya saing sehingga meningkatkan PDB Jawa Timur tentunya.

Untuk Kota Kediri Anggaran Belanja Daerahnya pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp1.291.791.333.600,00 dimana Rp91.769.998.252,00 (7,10%) merupakan belanja tidak langsung dalam bentuk belanja untuk subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan kepada Partai Politik. Sedangkan untuk tahun 2020, Anggaran Belanja Daerahnya ditetapkan sebesar Rp1.424.625.920.381,00 dimana Rp64.943.242.970,00 (4,59%) merupakan belanja tidak langsung dalam bentuk belanja untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja subsidi dan belanja bantuan kepada Partai Politik pada tahun anggaran 2020 ini ditiadakan (Kemenkeu RI, 2021)

Menurut Aristanto (2019), Belanja APBD merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemanfaatan belanja APBD hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya dalam program meningkatkan perekonomiannya melalui pemberdayaan UMKM maupun meningkatkan pelayanan publik.

Guna mendorong UMKM lebih meningkat kinerja dan kegiatannya, maka pemerintah telah menerbitkan beberapa paket kebijakan, yaitu pelatihan dan pemberian modal usaha bagi wirausahawan yang nilainya sekitar Rp25.000.000 dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlah bunganya mencapai 9%. Program ini mencakup di dalamnya fasilitas pemberian modal dan investasi kepada UMKM yang usahanya berjalan dengan produktif (*feasible*) namun dengan catatan tidak dapat akses kepada sektor keuangan yang ada di perbankan. Jumlah plafon kredit yang ada pada Kredit Usaha Rakyat sebesar 500 juta yang di jamin oleh perusahaan penjamin. Bantuan lain yakni terdapat bantuan kredit dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM serta program kemitraan dan Bina Lingkungan dan program pembiayaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dananya dari BUMN, BUMD, dan Perusahaan di sektor milik Swasta (Sugiyanto *et al.*, 2018).

Namun ternyata di lapangan menunjukkan belum semua program berjalan yang diprogramkan secara efektif, sehingga dapat berdampak pada tidak tercapainya peningkatan kinerja UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil.

#### **b. Kinerja UMKM**

Berdasarkan penelitian Munizu (2010), beberapa faktor yang ada di lingkup internal seperti aspek keuangan, aspek SDM, aspek teknik produksi/operasional, Aserta aspek pasar dan pemasaran mempunyai dampak efektif terhadap kesehatan UMKM. Sama halnya dengan faktor eksternal seperti halnya kebijakan dari pemerintah, Sosial Budaya dan Ekonomi, dan tentunya kinerja dari masing-masing lembaga. Sedangkan hal utama yang dikerjakan oleh UMKM di antaranya adalah meningkatnya tenaga kerja, pertumbuhan pangsa pasar dan pemasaran yang berimplikasi laba yang semakin naik, meningkatnya modal dan jumlah penjualan (Rokhayati, 2015).

UMKM di Kota Kediri yang dijadikan adalah Kelompok UMKM yang dipandang memiliki kinerja baik oleh Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri atau rekomendasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kediri. Berikut adalah tabel kinerja UMKM yang menjadi sampel pada penelitian ini.

**Tabel 4.** Nilai Kinerja Sampel UMKM di Kota Kediri

| No | U M K M        | Tingkat Pendidikan<br>(X <sub>1</sub> ) | Aspek Keuangan<br>(X <sub>2</sub> ) | Aspek Teknologi<br>(X <sub>3</sub> ) | Aspek Pemasaran<br>(X <sub>4</sub> ) | Nominal Dukungan Pemkot<br>(Rp) |
|----|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | T & T Souvenir | 2                                       | 3                                   | 2                                    | 1                                    |                                 |
| 2  | Batik Prasojo  | 4                                       | 2                                   | 5                                    | 2                                    |                                 |
| 3  | Ike Zahra      | 2                                       | 2                                   | 5                                    | 2                                    |                                 |
| 4  | UD.Ang         | 2                                       | 2                                   | 5                                    | 1                                    |                                 |

| No | U M K M                    | Tingkat Pendidikan | Aspek Keuangan    | Aspek Teknologi   | Aspek Pemasaran   | Nominal Dukungan Pemkot |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|    |                            | (X <sub>1</sub> )  | (X <sub>2</sub> ) | (X <sub>3</sub> ) | (X <sub>4</sub> ) | (Rp)                    |
| 5  | Jamur Crispi               | 2                  | 3                 | 5                 | 1                 |                         |
| 6  | SUJUNE                     | 2                  | 3                 | 5                 | 1                 |                         |
| 7  | Dapur Cobek                | 2                  | 2                 | 5                 | 1                 |                         |
| 8  | Wecono Asri Batik          | 2                  | 2                 | 5                 | 1                 |                         |
| 9  | Kuliner                    | 2                  | 2                 | 5                 | 1                 |                         |
| 10 | Tenun Ikat                 | 2                  | 2                 | 2                 | 1                 |                         |
| 11 | Coklat "Ibuke"             | 3                  | 2                 | 5                 | 1                 |                         |
| 12 | Asyifa/Kripek Tempe        | 3                  | 3                 | 5                 | 2                 |                         |
| 13 | Niky Coklat                | 2                  | 2                 | 5                 | 1                 |                         |
| 14 | Gomber Makanan Jadi        | 3                  | 2                 | 5                 | 1                 |                         |
| 15 | CV. Numand/Batik           | 3                  | 2                 | 5                 | 1                 |                         |
| 16 | Sekar Arum Artomoro/Sambel | 2                  | 2                 | 5                 | 1                 |                         |

### c. Pengaruh Kinerja UMKM terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri

Pengaruh kinerja UMKM terhadap belanja dianalisis dengan regresi berganda menggunakan program SPSS dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1975685.2 + -859416.4 X_1 + 1411140.6 X_2 + 45977.0 X_3 + 1623342.1 X_4$$

Hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada kinerja UMKM (tingkat Pendidikan, aspek keuangan, aspek teknologi dan aspek pemasaran), maka belanja daerah adalah senilai Rp1.975.685,20. Sedangkan setiap satu poin kenaikan kinerja UMKM (tingkat Pendidikan) akan menaikkan belanja Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp859.416,40 dan setiap satu poin kenaikan kinerja UMK (aspek keuangan) akan menaikkan belanja Pemerintah Kota sebesar Rp1.411.140,60 dan seterusnya. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi > 0.00, maka berdasarkan pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM secara nyata tidak berpengaruh terhadap hasil penjualan belanja daerah.

Selanjutnya dilakukan analisis korelasi dan ditemukan bahwa anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri dan Tingkat Pendidikan memiliki hubungan yang sangat lemah dan negatif ( $r = -0,131$ ) serta tidak berpengaruh secara signifikan ( $\text{sig } 0,314 > 0,05$ ). Begitu pula halnya dengan aspek teknologi ( $r = -0,048$ ) serta tidak berpengaruh secara signifikan ( $\text{sig } 0,430 > 0,05$ ) dan aspek pemasaran ( $r = 0,222$ ) dan tidak berpengaruh secara signifikan ( $\text{sig } 0,204 > 0,05$ ). Sementara aspek keuangan memiliki hubungan yang cukup terhadap anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Kediri ( $r = 0,364$ ) meski tidak berpengaruh secara signifikan ( $\text{sig } 0,083 > 0,05$ ). Berdasarkan koefisien determinasinya, dapat disimpulkan bahwa semua aspek berpengaruh sebesar 21,60% terhadap anggaran belanja daerah. Hal ini berarti ada faktor lain, di luar faktor yang diteliti, turut mempengaruhi anggaran belanja daerah.

Secara simultan, dilakukan analisis of varians (ANOVA) terhadap variabel-variabel dan diperoleh nilai signifikansi 0,574. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen aspek SDM (X<sub>1</sub>), aspek keuangan (X<sub>2</sub>), aspek produksi (X<sub>3</sub>), dan aspek pemasaran (X<sub>4</sub>), secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja UMKM (Y).

## **KESIMPULAN**

Kesejahteraan masyarakat (IPM) Kota Kediri mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2020. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Diduga terdapat pengaruh peningkatan belanja daerah Pemerintah Kota Kediri terhadap kinerja UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan belanja keuangan daerah Pemerintah Kota Kediri tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Kediri. Selanjutnya, faktor kinerja aspek keuangan UMKM yang berpengaruh paling dominan dalam memberikan kontribusi secara parsial pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Melihat hasil uji F yang artinya secara simultan tidak ada pengaruh antara kinerja UMKM dengan Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian ulang dengan memasukkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aristanto, E. (2019). *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur*. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 7(1), 1-13.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. (2020). *Statistik Daerah Kota Kediri*. BPS Kota Kediri, Kediri
- Cahyanti, Mega M & Dewi, A. W. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan di Kota Malang*, Jibeka Vol. 11 No. 2. pp. 73 – 79.
- Chamdani, M. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tangerang Tahun 2008–2014. *Ekonomi Bisnis*, 24(1), 34-54.
- Deswanto, D. B., Ismail, A., Hendarmin. (2017). *Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 3 pp. 187-210.
- Hamdani, A. H., & Awatara, I. G. P. D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi upgrading UMKM di Kota Surakarta. In *Prosiding Seminar Nasional 4th UNS SME's Summit & Awards* (pp. 176-183).
- Islami, N., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). *Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Umkm Yang Terdampak COVID-19*. Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi, 3(1), 45-57. Diambil dari <https://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/44>
- Jhingan, M. L (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2019). *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(1), 24-33.
- Maflukhah, A. (2015). *Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014: analisis dalam perspektif ekonomi Islam*. Undergraduate thesis, IAIN Jember.
- Marwanto. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Jawa Timur*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama,.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja

- Rosdakarya.
- Munizu, Musran. (2010). *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Repository.
- Musgrave, Richard A & Peggy B. Musgrave. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*, New York: Mc Graw Hill Company.
- Mutegi, H. K., Njeru, P. W. and Ongesa, N. T. (2015) *Financial Literacy and Its Impact on Loan Repayment By Small and Medium Enterpreneuers*, *International Journal of Economics, Commerce and Management*, III(3), pp. 1–28.
- Rakhmindyarto. (2020). *Bertumbuh Bersama UMKM*, Media Keuangan Vol. XV No. 158. Kemenkeu RI, Jakarta.
- Rohmah, S. (2018). *Evaluasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pos Ekonomi Produktif Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul*, *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1), pp. 75-95
- Rokhayati, I. (2015). *Pengukuran kinerja pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM): suatu telaah pustaka*. Monex: Journal of Accounting Research, 4(2).
- Setyowati S dkk. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Brebes*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora
- Sugiyanto, E. K., Widowati, S. Y., & Wijayanti, R. (2018). *Pola pengelolaan program CSR untuk meningkatkan daya saing UMKM*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(2), 240-249.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.